

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PENANGGULANGAN HIV/AIDS TAHUN 2019

Oleh

Sutrisno, Qomarudin, Liliek Winarti

Abstract

Increased findings of the new case of HIV/AIDS, the presence of Stigma and discrimination against ODHA that underlies the policy of Regent Regulation No. 49 year 2017 about implementation Directive District Regulation Sragen No. 6 year 2016 on HIV/AIDS prevention. And until now, still have problems with the implementation of HIV/AIDS prevention in Sragen district. To analyze the implementation of regulation of Regent Sragen Number 49 year 2017 about implementation Directive District Regulation Sragen Number 6 year 2016 about the prevention of HIV/AIDS in Sragen District.

Types of descriptive research with a qualitative approach. Sampling techniques by purposive sampling, research samples as many as 4 people from the organizers of policy providers, among others: Dinkes District Sragen, KPA District Sragen, NGO Muslimat NU and KDS Sukowati District Sragen. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and withdrawal of conclusions.

*Implementation of HIV/AIDS prevention policy in Sragen district has not been carried out with maximum. This is because there are some obstacles, among others: Information distribution is less than the maximum because the coverage area is too wide and long distance to the hinterland, resources are still lacking, lack of the commitment of the officers trained on the construction of the body ODHAdi. **Advice:** continuous transmission of information through innovative outreach and programs, eliminating negative stigma and discrimination on ODHA, strengthening coordination to keep the program running better and smoother.*

Keywords: *policy, HIV/AIDS, implementation*

Pendahuluan

Kebijakan publik penting untuk dipelajari karena alasan ilmiah, alasan professional dan alasan politik melalui beberapa tahapan, antara lain: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi / legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Kebijakan perlu dibuat atas dasar penyelesaian suatu masalah, termasuk masalah di

bidang kesehatan. Rendahnya pemahaman seseorang akan pentingnya kesehatan bagi dirinya membuat mereka memandang sebelah mata adanya permasalahan kesehatan di lingkungan sekeliling mereka. Kesehatan akan terganggu jika seseorang terserang penyakit, apalagi penyakit menular yang lebih rentan tertular dan menjadi masalah

yang sulit dikendalikan yaitu Penyakit HIV/AIDS.

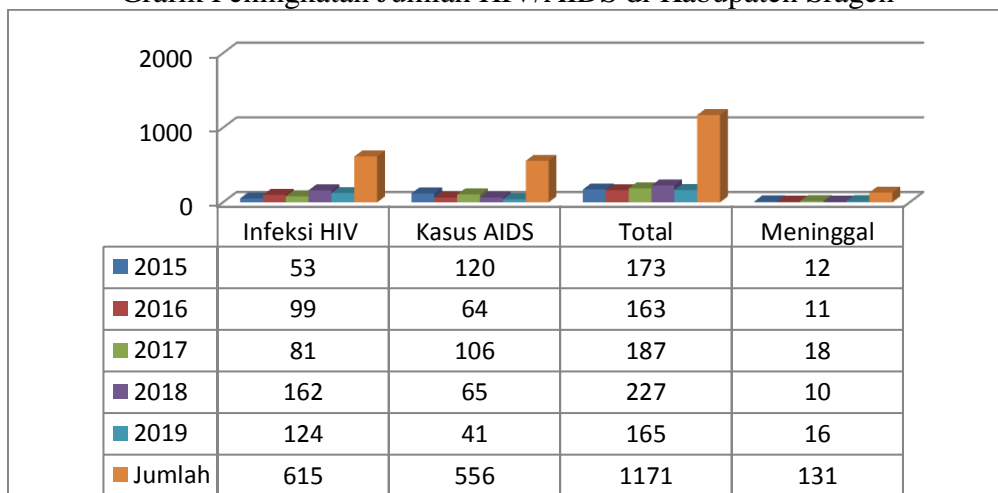
Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV. Orang Dengan HIV / AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV (Kementerian Kesehatan RI, 2013 : 1).

Data kasus HIV/AIDS di Indonesia berdasarkan laporan kumulatif dari Direktorat Jendral P2P Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia dari tahun 1987-2016 sebanyak 291,465 kasus, Jawa Tengah sebanyak 20,132 kasus. Data kasus HIV/AIDS tahun 2017 sebanyak 46,405 kasus, sehingga total kumulatif kasus HIV/AIDS dari tahun 1987-2017 yang tercatat dan di laporkan di Indonesia sebanyak 337,870 kasus (Kemenkes RI, 2018). Data kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sragen setiap tahun mengalami peningkatan, dari tahun 2000 sampai bulan September tahun 2019 yang tersebar merata di 20 kecamatan di Kabupaten Sragen, yang terdiri dari 615 penderita terinfeksi HIV dan 556 kasus AIDS. (Profil DKK Sragen, 2019). Data HIV/AIDS di Kabupaten Sragen, 5 tahun terakhir, dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1

Grafik Peningkatan Jumlah HIV/AIDS di Kabupaten Sragen



Sumber : Arsip Pelaporan Bidang P2P DKK Sragen.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen dan salah satunya adalah menetapkan regulasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Penanggulangan HIV/AIDS, yaitu Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Peraturan ini masih dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya, karena

masih ada permasalahan-permasalahan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Banyak masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait yang belum tahu mengenai kebijakan ini, penemuan kasus baru yang terus meningkat serta stigma di masyarakat terhadap ODHA yang menyebabkan banyak terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap ODHA baik dalam hal pekerjaan, hubungan sosial, perawatan, pengobatan, pendidikan dan lain-lain.

Timbulnya ketidaksesuaian apa yang diinginkan dan apa yang terjadi membuat tujuan dari kebijakan tersebut tidak dapat sepenuhnya tercapai. Dari latar belakang di atas, judul yang diangkat adalah Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2019.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Best dalam Hamid (2011: 145) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Fenomena itu dapat berupa perilaku, perspektif, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik. Menurut Moleong (2014: 6)

Tempat dan Unit Analisa Penelitian

Peneliti menentukan tempat dan analisa penelitian ini, pada :

Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berhubungan dengan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen yaitu : LSM Pendamping ODHA / Kelompok Dukungan sebaya (KDS) dan LSM Penjangkau orang yang berisiko tertular HIV/ AIDS (Muslimat NU) di Kabupaten Sragen. Penetapan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi instansi / kelembagaan yang ada.

Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015:85) **Purposive Sampling** adalah adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang telah penelitian lakukan cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun informan penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi P2PM pada Bidang P2P di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
2. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sragen ;
3. Ketua LSM Pendamping (KDS); dan
4. LSM Penjangkau (Muslimat NU) Kabupaten Sragen.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Moleong (2014: 157) mengungkapkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif

adalah kata-kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis karena pada dasarnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2014: 186) pengertian wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua pihak antara pewawancara (interviewer), dan terwawancara (interviewee).

2. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan di lapangan. Spardley dalam Sugiyono (2011: 229)

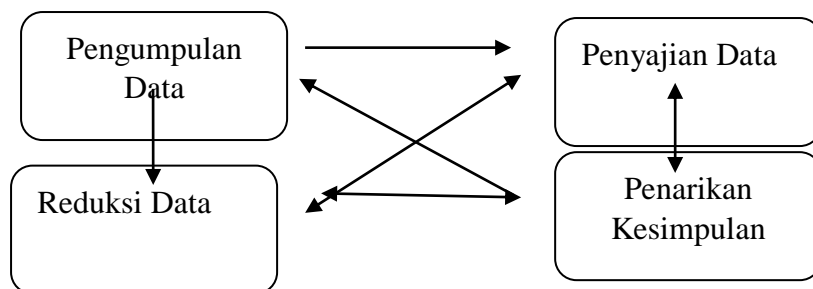
mengatakan “objek observasi dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku), dan activites (aktivitas)”. Bentuk observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini antara lain melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012 : 240) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah semua jenis rekaman atau alat catatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti foto, buku-buku, literatur, arsip, atau dokumen lainnya.

Teknik Analisis Data

Model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman (2014 : 89), sebagaimana digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Analisis Interaktif

Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas dan reliabilitas data berkaitan dengan keabsahan data penelitian, dilakukan dengan proses triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri (Moleong, 2014: 330).

Pembahasan & Hasil Penelitian

Deskripsi Lokasi Penelitian

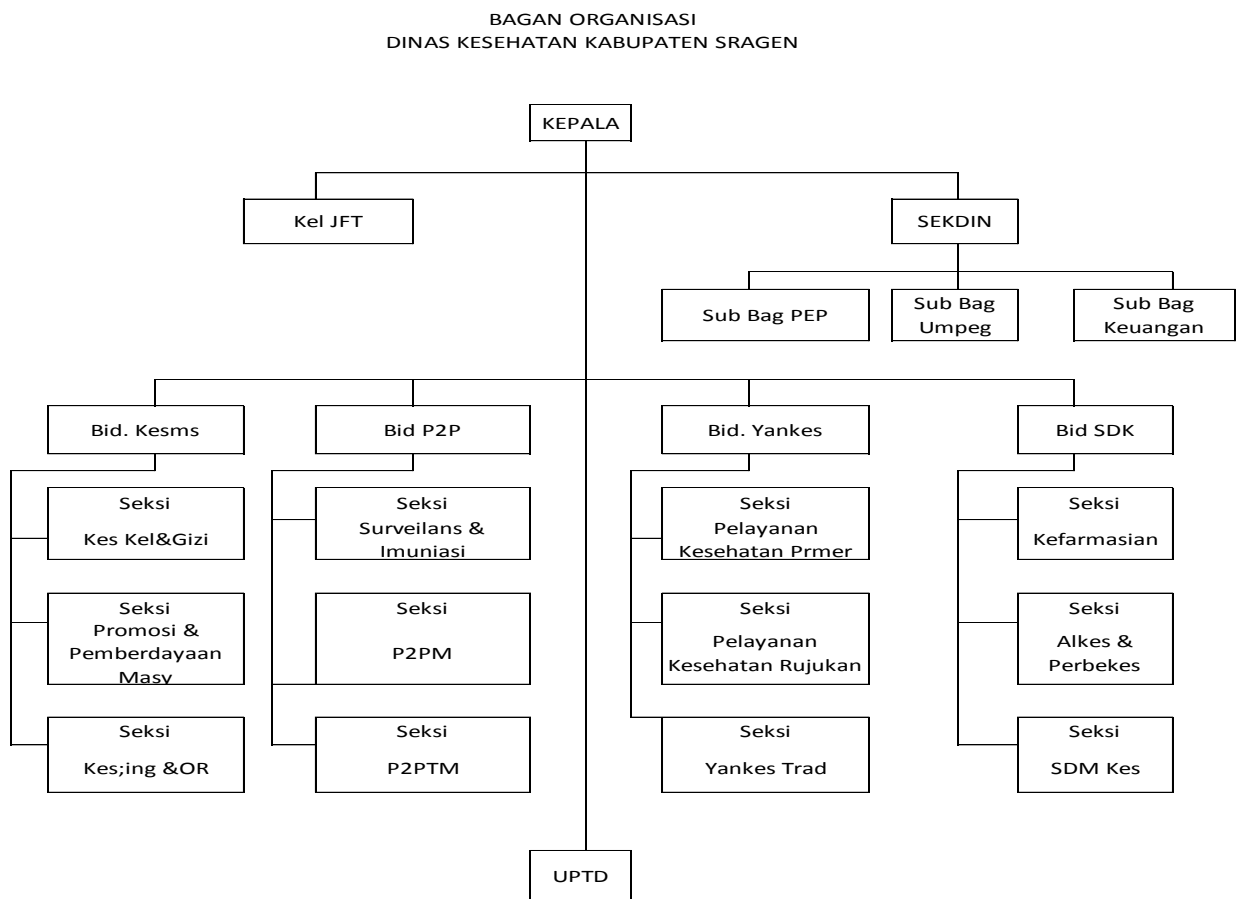
1. Keadaan Geografis Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen terletak secara geografis antara 110.45' dan 111.10' BT serta 7.15' dan 7.30'LS. Kabupaten Sragen mempunyai luas wilayah sebesar 941,55 Km² terbagi dalam 20 kecamatan, 208 desa/kelurahan. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Sragen adalah:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali

2. Deskripsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen
Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen (DKK Sragen) terletak di Jalan Raya Sukowati No.599, adapun SOTK DKK Sragen :



Gambar : Struktur Organisasi DKK Sragen

3.Deskripsi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sragen (KPA Kabupaten

Sragen) berlokasi di Jalan Raya Sukowati, No. 255, Komii Penanggulangan AIDS Kabupaten (KPAK) di Kabupaten Sragen telah ada sejak tahun 2013 dengan adanya SK Bupati Sragen Nomor : 440/93/002/2013 tentang Pembentukan KPA Kabupaten Sragen.

4. Deskripsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Muslimat NU
Lembaga Swadaya Masyarakat Muslimat Nahdatul Ulama (LSM Muslimat NU) Kabupaten Sragen berlokasi di Jalan Kartini Nomor 928, RT 18 / IX, Krapyak, Sragen Wetan, Sragen. Struktur organisasi LSM Muslimat NU terdiri dari pembina, ketua yayasan, pengawas, sekretaris, bendahara. LSM ini terpilih oleh program dalam rangka penjangkauan tempat-tempat berisiko tinggi terjadi penularan HIV/AIDS.

5. Deskripsi Lembaga Swadaya Masyarakat Pendampingan ODHA (Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Sukowati) Sragen.

Kelompok Dukungan Sebaya sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi orang-orang yang peduli pada HIV/AIDS, yang merupakan siklus bakal terbentuknya Yayasan Sehat Panghuripan Sukowati mulai awal 2017, namun secara legal formal baru berdiri dengan akte notaris Nomor 59 tertanggal 15 Juli 2017 dan SK kementerian No.AHU.0010348.AH.01.04 tahun 2017. YAYASAN SPASI sendiri beralamatkan di Dukuh Ledok, RT 06, RW 03, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen (57291).

6. Deskripsi Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen
Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen di koordinir oleh Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sragen.

Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Informan Penelitian :
Informan ada 4 (empat) orang informan yang berasal dari beberapa instansi, diantaranya 1 orang dari Dinas Kesehatan, 1 orang dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), 1 orang dari LSM Penjangkau : Muslimat NU dan 1 orang dari LSM Pendamping : Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Sukowati Kabupaten Sragen.

2. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisa hasil penelitian dan pembahasan akan dijelaskan mengenai tanggapan dari para informan penelitian yang diukur dari indikator kebijakan publik dari teori George Edward III. Indikator-indikator tersebut diantaranya: a) Komunikasi; b) Sumberdaya; c) Disposisi; dan d) Struktur Birokrasi. Berikut masing-masing penjabaran dari indikator hasil penelitian :

a. Indikator Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan ini dilihat dari 3 (tiga) bagian yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Masing-masing bagian dapat dijelaskan dari ringkasan hasil wawancara dengan ke empat informan sebagai berikut: Transmisi atau penyaluran informasi dari aparaturnya pelaksana kepada penerima program sudah cukup, hambatan yang dialami adalah

wilayah jangkauan yang terlalu luas dan jangkauan jarak jauh ke daerah pedalaman di Wilayah Kabupaten Sragen. Kejelasan dalam penyampaian informasi yang dilakukan ditandai dengan adanya sosialisasi mengenai program-program yang sedang dijalankan, dengan adanya koordinasi, pertemuan (rapat) dengan lembaga-lembaga terkait.

Kejelasan akan kebijakan program sudah bagus, mencakup upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Program tersebut diberikan semaksimal mungkin karena pemerintah tidak mungkin memberikan informasi setengah-setengah terkait isu HIV/AIDS dan harus dilakukan secara terus-menerus serta berkesinambungan sehingga semua lapisan masyarakat memahami isu HIV dan AIDS yang sedang marak saat ini. Tetapi, meskipun penyuluhan sering dilakukan, terdapat hambatan dalam penyampaian informasi, proses itu berhenti disatu pihak, tidak tersampaikan lagi pada yang lainnya. Hal lainnya yang membuat informasi yang diterima tidak jelas dan lengkap adalah adanya perepsi dan keyakinan masyarakat terhadap HIV/AIDS masih belum menyeluruh. Salah satu kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang diarahkan untuk mengurangi dan menghilangkan stigma dan perlakuan diskriminasi bagi ODHA.

b. Indikator Sumberdaya

Indikator sumberdaya ini dilihat dari 5 (lima) bagian yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, Kewenangan, Fasilitas dan Sumber Daya Finansial (Dana). Masing-masing bagian dapat dijelaskan dari

hasil ringkasan wawancara dari ke empat informan sebagai berikut:

Sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan sudah memiliki kualitas yang kompeten di perkerjaannya masing-masing. Akan tetapi masih diperlukan penyesuaian kemampuan dibagian-bagian tertentu. Dengan program yang cukup banyak dan jumlah ketersediaan sumberdaya yang ada, dirasa belum mencukupi. Sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan kebijakan ini dalam segi kuantitas masih kurang memadai, baik itu di Dinas Kesehatan Kabupaten, Komisi Penanggulangan AIDS, LSM Muslimat NU maupun dari Kelompok Dukungan Sebaya Sukowati.

Informasi dan kewenangan dalam pelaksanaan program sudah cukup baik antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, KPA Kabupaten Sragen, LSM seperti Muslimat NU serta KDS Sukowati. Informasi dapat berjalan lancar melalui komunikasi *by What App* maupun diadakan koordinasi pertemuan baik dari di KPA Kabupaten Sragen maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Kewenangan dari tiap instansi memiliki porsi masing-masing dan dapat terkoordinasi dengan baik di bawah Koordinator KPA Kabupaten.

c. Indikator Disposisi (Sikap)

Disposisi (sikap) dilihat dari 3 (tiga) bagian yaitu Respon, tindakan, dan komitmen. Masing-masing dijelaskan dari ringkasan hasil wawancara dengan ke empat informan. Respon, tindakan, dan komitmen yang dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen sudah bagus. Meskipun masih ada masalah

yang sulit diatasi sampai sekarang yaitu mengurangi bahkan menghilangkan Stigma dan Diskriminasi di masyarakat, sebagai contoh komitmen petugas saat proses pemulasaraan jenazah ODHA, padahal Alat Pelindung Diri dan Pelatihan sudah dilaksanakan, akan tetapi masih ada petugas yang menolak melakukan proses pemulasaraan jenazah. Sehingga, setiap ada kasus kematian ODHA di rumah masih dirujuk ke RS. Pemahaman sebuah kebijakan yang dilakukan oleh implementor masih beragam satu dengan yang lainnya.

d. Indikator Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi dilihat dari 2 (dua) bagian yaitu *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan Fragmentasi. Masing-masing bagian dapat dijelaskan dari ringkasan hasil wawancara dengan ke empat informan. Masing – masing kelembagaan dalam melaksanakan Program Penanggulangan HIV/AIDS sudah melaksanakan program yang dijalankan sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOPs). Pelaksanaan dimaksimalkan sesuai SOPs yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab, dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan fragmentasi dalam hal upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari OPD dalam pelaksanaan Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen cukup baik. Hal tersebut, dilihat dari laporan tiap Puskesmas, Rumah Sakit Negeri/Swasta beserta Klinik/DPM sudah rutin melakukan pelaporan mengenai penemuan kasus HIV/AIDS setiap bulan. Termasuk

Lembaga Swadaya Masyarakat baik penjangkau (Muslimat NU) maupun Pendamping (KDS), juga wajib membuat laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan program HIV/AIDS yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan KPA Kabupaten Sragen.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tentang Penanggulangan HIV/AIDS pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada beberapa permasalahan yang membuat pencapaian tujuan kebijakan ini masih belum sempurna, antara lain :

1. Indikator Komunikasi

Penyaluran informasi kurang maksimal karena wilayah jangkauan terlalu luas dan jarak jauh ke daerah pedalaman. Hasil informasi penyuluhan berhenti disatu pihak yang menyebabkan resistensi dari masyarakat karena informasi tentang HIV/AIDS yang tidak menyeluruh. Sehingga dari tahun ke tahun temuan kasus baru HIV AIDS terus meningkat dan kasus stigma dan diskriminasi bagi ODHA masih ada.

2. Indikator Sumberdaya

Sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan kebijakan ini dalam segi kuantitas masih dirasakan kurang dan tidak sebanding dengan kegiatan yang ada.

3. Indikator Disposisi (Sikap)

Sikap implementor pada umumnya sudah baik, koordinasi dan komitmen diadakan dan dilakukan rutin di bawah koordinasi Komis Penanggulangan Aids Kabupaten, meskipun secara teknis masih ada

saja yang masih kurang. Salah satu contohnya adalah komitmen petugas saat proses pemulasaraan jenazah ODHA di rumah. Juga sikap ODHA sendiri yang tergabung dalam KDS masih ada yang belum berani membuka status.

4. Indikator Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi pada penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sragen sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan sudah sesuai *Standar Operating Procedures* (SOPs), terkadang baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Firdaus, Sunny Ummul, Munawar Kholil, Kukuh Tejomurti, Tegar Adi Wicaksono. 2016. *Orang dengan HIV & AIDS (ODHA) dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: A.Com Printing.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Miles, Mattew dan Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bumi Askara.

Winarno B. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS.

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.

Sumber Lain

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2007 Laporan Nasional 2007*.

Jakarta: BPPK Departemen
Kesehatan RI.

Dinas Kesehatan Kabupaten
Sragen. 2017. *Profil Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen
Tahun 2017*. Sragen : DKK Sragen.

Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia 2018. *Laporan
HIV-AIDS di Indonesia*. Jakarta:
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia.